

**PENGAWASAN TATA KELOLA DESTINASI WISATA
BUKIT MERALAYA OLEH PEMERINTAH DESA
MEKARSARI KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN
CIAMIS**

Wulan Nuriyanti¹, H. Sirodjul Munir², Lina Marliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: wulannuriyanti71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator masalah yaitu kurangnya Pemerintah Desa dalam pemeliharaan infrastruktur pada objek wisata Bukit Meralaya yaitu kondisi fasilitas pelayanan yang mulai rusak seperti gazebo, kamar mandi dan spot foto, kurangnya kebersihan di area objek wisata, dan area parkir yang belum memadai. Serta Pemerintah Desa kurang inovatif sehingga objek wisata Bukit Meralaya tidak memiliki daya tarik yang baru bagi pengunjung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi, display dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengelolaan Objek Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Dari dimensi pengawasan (controlling) yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 1 indikator yang belum berjalan dengan optimal yaitu pengawasan terhadap sarana prasarana yang ada di Objek Wisata Bukit Meralaya belum dilaksanakan secara rutin.

Kata Kunci: Pengawasan, Tata Kelola, Destinasi Wisata

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam suatu negara khususnya dalam pengembangan potensi wisata di daerah untuk menarik pengunjung

baik lokal, domestik atau mancanegara (Wardani, A. K., Medianegara, A., Hidayat, E. S., & Zulfan, M, 2024). Sektor pariwisata harus dikelola dengan baik oleh orang yang kompeten di bidang tersebut sehingga para ahli bisa

memaksimalkan potensi objek wisata agar bisa membantu meningkatkan pendapatan yang tinggi bagi negara. Sebagai mesin ekonomi, sektor pariwisata dapat memberi solusi terhadap pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pariwisata mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah menjadikan pariwisata sebagai program unggulan pembangunan ekonomi. Hal tersebut sangat wajar karena pariwisata sudah terbukti berkontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, karena menjadi penyumbang pendapatan tinggi bagi daerah maupun negara.

Pengawasan suatu objek wisata harus mampu memberikan manfaat positif terhadap perubahan besar di kehidupan bermasyarakat. Sektor ekonomi pariwisata mempunyai dampak yaitu semakin luasnya dunia usaha dan terciptanya lapangan kerja seperti menyediakan warung-warung dan sebagai pemandu wisata. Selain itu, pengelolaan objek wisata dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan potensi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 dalam peraturan desa huruf d bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri secara

berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan berkembangnya pemerintahan.

Pengawasan adalah proses memantau atau meninjau pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana rencana. Melalui pengawasa diharapkan penyimpangan-penyimpangan di berbagai bidang dapat dihindari guna mencapai tujuan. Robbins (1984) menjelaskan, "control is the process of monitoring activities to ensure significant deviations". Dengan kata lain pemantauan segala aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana direncanakan dan pemeriksaan terhadap adanya penyimpangan menjadi hakekat pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung (direct control) atau pengawasan tidak langsung (indirect control).

Bukit Meralaya merupakan salah satu objek wisata yang ada dan mulai di kelola di Dusun Lingharja Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Bukit Meralaya seperti menikmati pemandangan alam, serta sekedar santai menikmati hidangan bersama keluarga maupun orang terdekat. Bukit Meralaya adalah sebuah tempat yang menyajikan pemandangan alam dengan luas wilayah Bukit Meralaya yaitu 1,5 Ha. Awal mulanya Bukit Meralaya hanya sebuah

penamaan yang dulunya merupakan tempat PLPM (Pusat Latihan Pemberdayaan Masyarakat) se-Kabupaten Ciamis. Pemberian nama Bukit Meralaya sendiri berasal dari Bukit yang merupakan puncak, namun karena telah banyak yang menggunakan nama puncak untuk sebuah wisata maka dipilih nama Bukit agar menjadi pembeda sedangkan Meralaya berarti tinggi. Jadi Bukit Meralaya adalah puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat disekelilingnya.

Sejalan dengan adanya Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendorong agar masyarakat desa untuk berubah dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan. Pengelolaan destinasi wisata dalamsuatu desa harus bisa meningkatkan pendapatan, dengan menerapkan konsep ekoturisme yaitu pariwisata yang terletak di kawasan alam dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pengawasan tata kelola destinasi wisata Bukit Meralaya oleh pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat ditunjukan dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut. Kurangnya Pemerintah Desa dalam pemeliharaan infrastruktur

pada objek wisata Bukit Meralaya yaitu kondisi fasilitas pelayanan yang mulai rusak seperti gazebo, kamar mandi dan spot foto, kurangnya kebersihan di area objek wisata, dan area parkir yang belum memadai.

Maka berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat Denzin & Lincoln (1987) mengemukakan bahwa, "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada".

Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis didasarkan pada dimensi pengawasan (controlling). Menurut Terry dalam (Wijaya & Rifa'i, 2016: 26-46) terdapat dimensi pengawasan dengan indikator pemerintah desa melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata, pemerintah desa mengawasi atau mengontrol

melalui laporan lisan maupun tulisan mengenai pengelolaan objek wisata serta pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di objek wisata melalui pemeriksaan rutin. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi, display dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah proses memantau atau meninjau pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana rencana. Melalui pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan di berbagai bidang dapat dihindari guna mencapai tujuan. Pengawasan bertujuan untuk mengawasi kegiatan- kegiatan dari pengelolaan sudah dilaksanakan sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi sumber daya dalam organisasi supaya dapat terpakai secara efektif dan efisien.

Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan pembahasan masing-masing indikator yang dijadikan alat ukur penelitian sebagai berikut:

Pemerintah desa melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada indikator Pemerintah Desa

melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata telah dilakukan oleh Pemerintah Desa telah berjalan baik melalui kasi yang bertugas yaitu kasi kesejahteraan. Proses pengawasan secara langsung tersebut dengan memantau langsung ke lapangan, pengawasan tersebut juga memiliki jadwal khusus yaitu dilakukan minimal seminggu sekali oleh Kasi Kesejahteraan.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa dalam proses pengawasan secara langsung Pemerintah Desa memonitor segala kegiatan pengelolaan. Pengawasan tersebut dilaksanakan setiap hari sabtu oleh satu atau dua orang perangkat Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Soelistriyo (2003:86) dalam Suratman& Zuhakim(2023:145), mengungkapkan n macam teknik pengawasan yaitu, “Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan sendiri oleh atasan langsung tanpa perantara”.

Berdasarkan teori diatas, hasil wawancara dan juga observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai proses pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan pengelolaan objek wisata telah berjalan optimal. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya kendala yang berarti dikarenakan lokasi yang dekat antara objek wisata dan kantor Kepala Desa sangat memudahkan proses pengawasan

secara langsung. Pemerintah Desa telah melakukan upaya terbaik untuk pelaksanaan pengelolaan objek wisata dengan pengawasan langsung atau melalui laporan-laporan kegiatan pengelolaan objek wisata. Adanya pengawasan secara langsung dari Pemerintah Desa kepada kelompok pengelola merupakan langkah dalam prosedur pengelolaan objek wisata yang dapat meningkatkan peran pemerintah. Pemerintah Desa mengawasi atau mengontrol melalui laporan lisan maupun tulisan mengenai pengelolaan objek wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Pemerintah Desa telah mengawasi laporan – laporan mengenai pengelolaan objek wisata melalui laporan tertulis maupun laporan secara lisan dari kelompok pengelola dengan baik. Berdasarkan jawaban dari informan pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata selalu dilaporkan baik oleh lisan atau melalui tulisan. Pemdes pun mengawasi dan menerima laporan-laporan yang berasal dari lapangan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya pengawasan secara tidak langsung dalam proses pengelolaan Objek Wisata Bukit Meralaya dan banyak dilakukan laporan lisan dalam proses pengelolaan objek wisata. Hal tersebut dibuktikan juga dengan adanya laporan-laporan tertulis dari kelompok pengelola setiap tahunnya

dari pihak pengelola kepada Pemerintah Desa seperti laporan keuangan, laporan kegiatan pengelolaan dan laporan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa indikator Pemerintah Desa mengawasi atau mengontrol melalui laporan lisan maupun tulisan mengenai pengelolaan objek wisata telah dilaksanakan dengan optimal. Dibuktikan dengan Pemerintah Desa mengontrol laporan lisan maupun laporan tertulis dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata. Hal tersebut sejalan dengan teori mengenai teknik pengawasan secara tidak langsung menurut Soelistriyo (2003:86) dalam Suratman & Zuhakim (2023:145) mengungkapkan bahwa, “teknik pengawasan yang kedua yaitu, pengawasan tidak langsung yang artinya pengawasan yang dilaksanakan dengan perantara sesuatu alat yang berwujud laporan, baik laporan lisan maupun tulisan”. Pengawasan tidak langsung melalui pengontrolan laporan-laporan dalam pengelolaan objek wisata penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan anggaran atau pada proses serta kewenangan dalam pengelolaan objek wisata.

Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di objek wisata melalui pemeriksaan rutin. Berdasarkan hasil wawancara

penulis dengan informan diketahui bahwa Pemerintah Desa telah melakukan pengawasan terhadap sarana prasarana melalui pemeriksaan rutin seperti terkait eksekusi pembayaran listrik dan kebutuhan lain namun belum berjalan dengan optimal pada pelaksanaannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan setiap sebulan sekali dan memeriksa apakah sarana yang ada di objek wisata masih layak atau tidak untuk kenyamanan pengunjung.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap sarana prasarana objek wisata mengalami kendala dikarenakan saat ini kondisi sarana prasarana yang ada di objek wisata mulai rusak atau terbengkalai. Sejalan dengan waktu sarana prasarana jika kehujanan kepanasan akan cepat mengalami kerusakan. Sedangkan untuk memperbaikinya memerlukan anggaran yang besar.

Adapun pendapat menurut Robins (1984) dalam Wijaya dan Rifa'I (2016:45) mengemukakan bahwa, "control is the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations". Dengan kata lain pemantauan segala aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana direncanakan dan pemeriksaan terhadap adanya penyimpangan menjadi hakekat pengawasan. Maka berdasarkan teori

tersebut mengenai indikator Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di objek wisata melalui pemeriksaan rutin, diketahui dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Terlihat dari kondisi saat ini sarana prasarana yang ada di objek wisata mulai rusak atau terbengkalai. Dalam hal ini pengawasan terhadap sarana dan prasarana menjadi aktivitas Pemerintah Desa dalam menjamin pencapaian tujuan sebagaimana yang direncanakan serta adanya pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sarana prasarana dan tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, karena hal ini adalah hakekat dalam proses pengawasan. Pemerintah Desa dapat memantau segala aktivitas pengelolaan objek wisata dengan optimal kemudian setelah itu dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk pengembangan objek wisata Bukit Meralaya kedepannya terutama mengenai sarana prasarana yang ada di objek wisata ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pada dimensi yang terakhir yaitu controlling (pengawasan) dalam pengelolaan objek wisata Bukit Meralaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarsari belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari indikator yang terakhir yaitu mengenai Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap

sarana dan prasarana yang ada di objek wisata melalui pemeriksaan rutin kurang berjalan dengan baik, dikarenakan adanya hambatan terkait fasilitas tradisional yang cepat lapuk, kurangnya anggaran dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana prasarana yang ada di objek wisata setelah dilakukannya pemeriksaan rutin tersebut serta adanya peralihan kepengurusan pihak pengelola sehingga pelaksanaan pengawasan secara rutin mengalami kendala.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu memberikan masukan dari pihak pengelola ke Pemerintah Desa terkait tiket masuk pada waktu tertentu supaya bisa meningkatkan pemasukan pada objek wisata, untuk lebih meningkatkan Pemerintah Desa kedepannya akan membuat fasilitas permanen serta modern untuk memudahkan dalam proses pengawasan, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu lingkungan masyarakat dan Dinas-Dinas terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Dari dimensi pengawasan (controlling) yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 1 indikator yang

belum berjalan dengan optimal yaitu Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di objek wisata melalui pemeriksaan rutin.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam Pengawasan Tata Kelola Destinasi Wisata Bukit Meralaya Oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis adalah terkendala oleh fasilitas tradisional yang cepat lapuk, terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang kurang layak, serta adanya peralihan kepengurusan pengelola objek wisata sehingga terjadi kendala pada proses pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarsari yaitu memberikan masukan dari pihak pengelola ke pemerintah desa terkait tiket masuk supaya bisa meningkatkan pemasukan pada objek wisata, Pemerintah Desa kedepannya akan membuat fasilitas yang permanen serta modern untuk memudahkan dalam proses pengawasan dan Pemerintah Desa menjalin kerja sama dengan lingkungan Masyarakat maupun Dinas-Dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Ari. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative

- Elbadiansyah. (2023). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Ismayanti, C., Agus, N., Erlan, S. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Bukit Meralaya Di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Repository Unigal*. 2(1), 2311-2325
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal moderat*. 5(1), 153-165.
- Rostika, R. (2019). Pengeloaan Objek Wisata Situ Hiang Oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 5(4), 79-86.
- Sedarmayanti., Gumelar, S.S., Lia, A. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wardani, A. K., Medianegara, A., Hidayat, E. S., & Zulfan, M. (2024). Pengembangan Potensi Tempat Wisata Sungai Cileueur Di Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 490-497.
- Suwarnayasa, K., Iyus, A.H. (2017). Persepsi Wisatawan Terhadap Keberadaan Objek Wisata Air Terjun Di Dusun Jembong. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. 9(2), 473-483.
- Wijaya, C., Muhammad Rifa'i. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien)*. Medan: Perdana Publishing
- Zebua, M. (2021). *Bangun Pariwisata*. Bogor: Guepedia